BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Dispensasi nikah/kawin adalah usaha hukum pemohon untuk meminta izin menikah agar dapat melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan alasan mendesak oleh Pengadilan Agama setempat. Alasan mendesak termasuk dalam problematika sehingga mengharuskan pemohon meminta mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan di bawah umur. Mekanisme tata cara mengenai prosedur dan pelaksanaan penyelesaiannya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Sedangkan landasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan menerima maupun tidaknya perkara permohonan dispensasi nikah yaitu meninjau dua sumber hukum baik dari ketentuan Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019 dan juga PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta faktor kontekstual dimana hakim meninjau keadaan atau beberapa fakta yang terjadi pada kedua belak pihak calon mempelai dan juga fakta yang sebenarnya dalam persidangan dimana hakim harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

F. Saran

Mengenai pembahasan terkait perkara dispensasi nikah ini, hukum belum terlaksana dengan baik terhadap ketentuan hukum yang bertabrakan yaitu struktur hukum dan substansi hukum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat multitafsir yaitu “boleh melakukan dispensasi nikah dengan alasan mendesak” dari sudut pandang budaya hukum belum setara yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat. Maka dengan demikian menurut penulis, untuk mencegah angka tinggi dispensasi nikah perlu adanya peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui sosialisasi pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait kesehatan mental, reproduksi, pola pergaulan dengan baik serta pernikahan dibawah umur, dengan menciptakan organisasi di lingkungan masyarakat didukung dengan ketentuan Undang – Undang yang mengatur terkait hal tersebut serta kesediaan masyarakat dan aparaturnegara yang saling berkontribusi agar dapat terlaksanakan dengan baik sosialisasi tersebut sehingga masyarakat mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur dilarang oleh Undang – Undang selain itu juga pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak tersebut.